

**PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN
DESA SEBADAI HULU KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
KABUPATEN NATUNA**

Oleh

Nendra Ilyadi

Email : nendrailyadi@yahoo.com

Pembimbing : Dra. Ernawati, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Publik – Prodi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACTION

NENDRA ILYADI, 1001120291. Execution of Tasks in a Village Head Village Development Districts Sebadai Upstream Bunguran Northeast District Natuna. guided by Dra. Ernawati. M. Si.

Village head as formal leaders in village governance plays an important role in determining the successful implementation of development, especially at the village level. Execution of tasks in rural development can not be separated from the village chief leader figure. Strategic position as an element owned by the village chief in village administration leader who is the central point and the dynamic factor or that embody the entire course of growth and governance activities of the village.

Purpose of this study is to investigate the implementation of tasks in a village head village development districts sebadai upstream Bunguran northeast district Natuna and the factors that hinder the implementation of tasks in a village head village development districts sebadai upstream Bunguran northeast district Natuna. To analyze the phenomenon in this study the authors used the theory Winardi the right time utilization indicator, the number of outputs, willingness to cooperate, and the quality of work. Methodology used in this study was a qualitative study using purposive sampling and snowball sampling.

The results of this study demonstrate the implementation of tasks in a village head village development districts sebadai upstream Bunguran northeast district Natuna still not optimal. As for the factors found are communication, resources and attitudes, whether from internal or external head of the village and community.

keywords: *Implementation of the village chief task*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian usaha pembangunan berarti humanisasi atau peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan dan senantiasa menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam hidupnya, baik secara rohani dan jasmani.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah Provinsi, dan Provinsi terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Oleh karena itu pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini Nugroho dan Rochmin Danuri (2004:142) pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perubahan menuju kearah yang dicapai. Dalam Pembukaan Undang-undang dasar 1945 pada alenia 4 dinyatakan bahwa tujuan nasional Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia, melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut telah dibentuk perangkat pemerintahan baik dalam pelaksanaan azas desentralisasi maupun dekonsentrasi. Dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi disusun perangkat pemerintahan mulai dari Propinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan dan sampai pada tingkat Desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di pedesaan peran serta pemerintah serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula halnya sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan Dalam Undang-Undang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Kepala desa memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan adalah urusan Pemerintahan Desa yang sudah ada berdasarkan asal-usul Desa. Urusan Pemerintah Desa yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas pembantuan dari Pemerintah propinsi, dan pemerintah Kabupate/Kota.

Mengenai pembangunan Desa di Desa Sebadai Hulu yang terselenggara oleh Kepala Desanya cenderung bersifat *top down*, yang tidak menciptakan pilihan dan harapan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan menyangkut kepentingan masyarakat sangat minimal. Terjadi penyimpangan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan

Pembangunan Desa, bahwa kebijakan pembangunan desa (Bangdes) digunakan untuk program yang diprioritaskan masyarakat desa.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut maka masalah pokok yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini adalah pentingnya pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagai pimpinan diwilayah Desa Sebadai Hulu dalam memajukan pembangunan desa. Berkenaan dengan hal pembangunan Desa di Desa Sebadai Hulu penulis mendapati beberapa Fenomena, diantaranya Pembangunan jalan penghubung yang kualitasnya tidak sesuai dengan standart dan cenderung pembangunanya hanya berfokus pada suatu lokasi.

Mengenai pembangunan Desa di Desa Sebadai Hulu yang terselenggara oleh Kepala Desanya cenderung bersifat *top down*, yang tidak menciptakan pilihan dan harapan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan menyangkut kepentingan masyarakat sangat minimal. Terjadi penyimpangan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa, bahwa kebijakan pembangunan desa (Bangdes) digunakan untuk program yang diprioritaskan masyarakat desa.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut maka masalah pokok yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini adalah pentingnya pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagai pimpinan diwilayah Desa Sebadai Hulu dalam memajukan pembangunan desa. Berkenaan dengan hal pembangunan Desa di Desa Sebadai Hulu penulis mendapati beberapa Fenomena, diantaranya:

1. Pembangunan jalan penghubung yang kualitasnya tidak sesuai dengan standart dan cenderung pembangunanya hanya berfokus pada suatu lokasi
2. Pembangunan sarana dan perasarana Desa yang telah ada cendrung tidak terawat dan tidak berfungsi dengan semestinya,
3. Kurangnya partisipasi Kepala Desa mengenai arti pentingnya pembangunan Desa.

Melihat dari fenomena-fenomena yang terjadi di Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna tentang pembangunan Desa, timbul keinginan penulis untuk meneliti dengan mengangkat judul penelitian:

“Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna”.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari gejala permasalahan yang ada di Desa Sebadai Hulu mengenai pembangunan jalan Desa, pembangunan sarana dan prasarana yang tidak terawat dan berfungsi semestinya, dan kurangnya motivasi dari Kepala Desa mengenai arti penting pembangunan Desa dan menjaganya. Maka sebagai dasar perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam memajukan

pembangunan di Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Memajukan Pembangunan di Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan adanya tujuan penelitian maka seorang peneliti akan lebih terarah kemana akan difokuskan penelitian dalam pemecahan masalah. Adapun tujuan dari penulisan ini :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Kepala desa dalam pembangunan Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna.
2. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam pembangunan Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
Adapun manfaat praktisnya dalam penenlitian ini diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan ditempat penelitian dilakukan.
2. Manfaat Akademis
Adapun manfaat akademis dalam penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

untuk mengimplementasikan ilmu yang didapatkan penulis dibangku kuliah, terutama yang menyangkut tentang permasalahan yang diteliti

D. Konsep Teori

1. Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas aparat pemerintahan Desa yang baik merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan tertentu yang dicapai melalui pelaksanaan tugas oleh aparat pemerintahan Desa itu sendiri dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara maksimal.

Menurut Agus Dharma (2005:9) mengatakan Pelaksanaan adalah sesuatu bagian yang dikerjakan atau produk jasa yang dihasilkan yang diberikan oleh seseorang atau kelompok orang.

Sedangkan Mohammad As'ad (2000:65) menyebutkan pelaksanaan tugas adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.

Menurut Winardi (1999:75) ada beberapa indikator untuk melihat pelaksanaan tugas, yaitu:

1. Pemamfaatan waktu yang tepat
2. Jumlah output
3. Kesiediaan untuk kerjasama
4. Kualitas pekerjaan

E. Kerangka Berfikir

Teori Pelaksanaan Tugas menurut Winardi (1999:75)

F. Konsep Oprasional

Untuk kepentingan analisis data dan pencapaian realitas dalam rangka pengkajian secara empiris, maka sejumlah konsep yang masih abstrak perlu

dioperasionalkan agar benar-benar berfokus pada fenomena yang akan diteliti. Selanjutnya yang menjadi konsep operasional dan pengukurannya dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pelaksanaan tugas kepala desa adalah seseorang pimpinan disuatu wilayah yang disebut Desa atau dengan nama lain yang diberi amanah dalam suatu situasi atau keadaan menunjukkan keberhasilan pencapaian tujuan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bekerjasama dengan Aparat Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penulis berupaya mencari fakta-fakta sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian, kemudian dipaparkan secara jelas guna memberikan gambaran tentang adanya suatu fenomena sosial.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Sebadai Hulu

Desa Sebadai Hulu adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna yang dulunya merupakan Desa Kelangan yang telah dimekarkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 7 Tahun 2006 tertanggal 30 november 2006. Pada saat itu juga ditetapkan PLT Kepala Desa yang selanjutnya dipilih secara langsung oleh masyarakat pada tahun 2007 dan

ditetapkan satu (1) orang, yaitu sebagai berikut :

1. ILYAS M. NIAT : Tahun 2006 s/d 2007
2. ILYAS M. NIAT : Tahun 2007 s/d 2013
3. ILYAS M. NIAT : Tahun 2013 s/d 2019

Selama periode 2006-2014 ini telah berbagai bidang dan sektor pembangunan yang telah dilaksanakan untuk mengejar ketertinggalan dari Desa-desanya lainnya terutama Desa-desanya diwilayah Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, baik pembangunan bantuan dari pemerintah pusat, propinsi, daerah maupun swadaya. Adapun pembangunan-pembangunan tersebut meliputi sarana prasarana akses jalan, pendidikan, kesehatan, perkantoran, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya.

\

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna

1.1. Tugas Kepala Desa

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang kewenangan diserahkan ke daerah, sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah Kabupaten/kota diwajibkan mencari solusi permasalahan dan peluang pendanaan pembangunannya secara mandiri. Lahirnya Undang-Undang

No. 32 Tahun 2004 sebagai langkah konkret upaya pengembangan Desa.

1.2. Pemamfaatan Waktu Yang Tepat

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan yaitu Kepala desa. Di satu sisi, para Kepala desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai segudang tugas kenegaraan yang diembannya, menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat, serta melakukan kontrol dan mobilisasi warga Desa.

Tidak hanya hal itu saja yang menjadi tugas daripada seorang Kepala desa, Kepala desa mempunyai tugas lain yaitu melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan di Desa karna kemajuan pembangunan Desa akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat didalamnya. Oleh karna itulah seorang Kepala desa harus memanfaatkan waktu dengan tepatnya sebagai Kepala desa guna peningkatan pembangunan Desa.

“ semasa jabatan saya, insyaallah saya selalu memikirkan masyarakat dalam setiap kebijakan yang saya buat. Tidak sedikitpun saya pikirkan tentang keuntungan yang saya dapatkan dari kebijakan atau pembangunan yang saya rencanakan, dan saya orangnya tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Tapi itu semua kembali pada masyarakat, kan masyarakat lebih tahu dan pantas menilai saya. (Kepala Desa, Jumat 27 juni 2014)”

Dari wawancara diatas menunjukan Kepala Desa Sebadai Hulu sangat peduli dengan masyarakat dan perduli dan sangat menghargai waktu.

Banyak Desa yang pembangunannya terkendala yang diakibatkan Kepala desa tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan tepat dan semaksimal mungkin, salah satunya yaitu disaat pasca MusBangDes yang begitu banyak dan padat sedangkan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan outputnya berupa rencana pembangunan yang terdiri dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RPTD (Rencana Pembangunan Tahunan Desa) dan DURP (Daftar Usulan Rencana Pembangunan) oleh karna itu Kepala desa dituntut harus bisa menggunakan dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin.

1.3. Jumlah Output

Desa yang sedang berkembang seperti Desa Sebadai Hulu sangat memerlukan dukungan dan bantuan dari pemerintah baik itu pemerintah pusat daerah sampai dengan lapisan masyarakat dibawahnya, yang kesemuanya berperan mengawasi dan ikut merealisasikan pembangunan-permbangunan Desa baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Keberadaan mereka juga memperlihatkan sebuah sistem dalam roda pemerintahan Desa dalam pembangunan Desa yaitu baik itu *top down* atau pun *bottom up*.

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala desa akan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Desanya baik itu berhasil atau gagal. Semua itu dilihat dari manfaat yang dihasilakn dari pembangunan tersebut serta partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan seperti tindakan gotong

royong dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan yang ada.

1.4. Kesediaan Untuk Bekerjasama

Perubahan pemerintahan Desa semakin terarah ketika agenda desentralisasi dan demokratisasi dibingkai UU No. 22/1999. UU itu telah memberikan garansi formal dan membuka ruang bagi Desa untuk membangun kemandirian (otonomi), ruang bagi eforia kebangkitan semangat lokalitas dan otonomi Desa, mendorong tata pemerintahan yang baik, membuat demokrasi bekerja melalui parlemen Desa, membuka partisipasi masyarakat Desa dalam pemerintahan dan pembangunan, serta mewujudkan pembangunan berbasis masyarakat Desa.

Jika desentralisasi diikuti dengan perubahan relasi antara Desa dan pemerintah supradesa, demokratisasi telah mendorong perubahan relasi kekuasaan internal dalam desa. UU No. 22/1999 telah memperkenalkan Badan Perwakilan Desa (BPD), sebuah institusi baru demokrasi yang menggantikan lembaga korporatis LMD. Di satu sisi kehadiran BPD dimaksudkan untuk menerapkan *subsidiarity* Desa dalam membuat peraturan Desa, dan di sisi lain BPD diharapkan menjadi ruang bagi artikulasi politik, partisipasi masyarakat dan kontrol terhadap pemerintah Desa. Secara empirik, ruang demokrasi yang terus terbuka dan kehadiran BPD telah membuat Desa semakin semarak dan memaksa Kepala desa membagi kekuasaan kepada parlemen Desa itu. Kekuasaan Kepala desa yang absolut dan sentralistik secara pelan-pelan digerogeti oleh demokratisasi, yang membuatnya lebih “hati-hati” dan bertanggungjawab

dalam mengelola kekuasaan dan kekayaan serta pembangunan Desa.

1.5. Kualitas Pekerjaan

Kepala desa adalah seorang pimpinan atau pemimpin tertinggi di Desa yang melaksanakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan dapat menjadikan dirinya sebagai contoh dan teladan bagi masyarakat Desa. Kunci sukses seorang pemimpin adalah mampu menumbuhkembangkan rasa taat yang tulus dan ikhlas di hati dan pikiran anak buahnya, yakni :

- a. Mampu memberikan suri tauladan dalam keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME, serta ketaatan terhadap peraturan disiplin itu sendiri.
- b. Mampu menegakkan hukum dan disiplin di lingkungan secara jujur, benar dan adil.
- c. Mampu bersikap dan berperan sebagai pengayom anak buahnya yang membutuhkan perhatian, bantuan, nasihat, petunjuk, secara tulus dan ikhlas.
- d. Mampu menjadi seorang guru, pembimbing, dalam setiap permasalahan baik masalah tugas maupun pribadi.
- e. Mampu berperan dan bersikap sebagai kawan yang baik, yang mau mendengarkan segala curhat dan keluhan anak buahnya pada saat santai di luar jam kantornya.

Kepala desa Sebadai Hulu telah dapat melakukan hal-hal diatas. Seperti yang disampaikan oleh Kadus I, bapak Sarbirin diselah pemilihan umum

Priesiden dan wakil presiden Negara Republik Indonesia pada rabu,9 juli 2014.

“ seperti yang dikatakan pak kades dalam pidatonya tadi pagi. Kita semuanya adalah pemimpin dan kita memimpin dan ada yang kita pimpin, jadi pilihlah pemimpin yang siap memimpin dan mau dipimpin. Menurut saya pak kades berkata itu telah sesuai dengan apa yang dia lakukan. Pak kades telah menjadikan dirinya contoh bagi saya dan bagi masyarakat desa. Mulai dari teladan dan keperibadian beliau yang selalu bermusyawarah dan mau berbaur dengan segala kalangan masyarak, mau miskin dan kaya dia temankan”.(Kadus 1, Rabu 9 juli 2014)

Perihal diatas membuktikan Kepala desa Sebadai Hulu dapat menjadikan dirinya sebagai tokoh yang sangat menjadi inspirasi masyarakat Desa baik gaya kepemimpinan dan kehidupan bermasyarkatnya.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna

Berdasarkan dari berbagai uraian di atas mengenai pelaksanaan tugas Kepala desa dalam pembangunan Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur laut kabupaten Natuna dan tugasnya sebagai pembina, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat tidak

terlepas dari berbagai hambatan ataupun tantangan. Hambatan itu meliputi komunikasi yang kurang dari Kepala desa kepada masyarakat, aparat Desa, dan pemerintahan di atasnya, rendahnya kualitas sumber daya, serta sikap dari Kepala desa itu sendiri. Dengan beberapa hambatan tersebut, jelas akan mempengaruhi keberlangsungan pembangunan yang ada di Desa.

2.1 Komunikasi

Komunikasi adalah suatu timbal balik atau bertukar pikiran antar satu orang atau lebih. Sebagai masyarakat tidak akan bias hidup sendiri dan kesemuanya membutuhkan bantuan orang lain dalam segala keberlangsungan hidup di dunia ini. Komunikasi sangat penting juga bagi suatu pemerintahan dalam hal ini adalah pemerintahan Desa, disaat suatu Desa mengadakan suatu acara atau kegiatan yang membahas pembangunan desa, maka Kepala desa, perangkat Desa, dan masyarakat harus kompak dan melakukan sebuah komunikasi agar tercipta sebuah kejelasan dan tidak terjadi salah paham dalam segala proses tersebut.

2.2. Sumber Daya

Pembangunan Desa merupakan bagian internal dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya pembangunan Desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan

kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Seperti yang telah dikatakan di atas mengenai pembangunan Desa salah satunya adalah peningkatan sumber daya. Pada unsur pemerintahannya sumber daya merupakan hal yang vital harus ada pada seorang pemimpin Desa, dalam hal ini adalah Kepala desa. Sumber daya yang harus ada pada seorang kepala desa yaitu kemampuannya baik yang berasal dari pendidikan formal atau dari alam, yaitu dari pengalaman memimpin dari seorang Kepala desa.

2.3. Sikap

Keberhasilan seorang Kepala desa dalam melaksanakan tugas tidak hanya ditentukan oleh salah satu aspek semata-mata, melainkan antara sifat, perilaku, dan kekuasaan-pengaruh saling menentukan sesuai dengan situasi yang mendukungnya. Kekuasaan-pengaruh mempunyai peranan sebagai daya dorong bagi seorang Kepala desa dalam mempengaruhi, menggerakkan, dan mengubah perilaku yang dipimpinnya dalam hal ini adalah masyarakat ke arah pencapaian tujuan pembangunan desa yang sesuai dengan tujuan nasional dan visi dan misi desa.

Kepala desa adalah orang yang mampu memberikan asumsi dan motivasi serta jalan yang pasti dan setidaknya benar kepada aparat Desa lainnya serta masyarakat yang dipimpinnya. Hal tersebut tidak juga mudah dilakukan oleh Kepala desa, sebuah sikap yang tetap dan nyata ditunjukkan oleh Kepala desa menjadikan hal itu bisa diwujudkan.

Hubungan antara sikap Kepala desa dengan masalah pembangunan Desa Sebadai Hulu jelas adanya, diantaranya sikap-sikap tegas yang harus ditunjukkan oleh Kepala desa dalam memberikan instruksi dan perintah kepada orang-orang yang terlibat dalam sebuah pembangunan Desa.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna sudah dapat dikatakan terlaksana, dikarenakan dalam pelaksanaan Tugas Kepala Desa ini telah berjalan dengan baik. Selanjutnya dalam hal produktivitas kerja dan kepuasan kerja mengenai sarana dan prasarana dalam memanfaatkan dan pelaksanaannya belum maksimal. Perlunya meningkatkan kualitas kerja dan akses jalan yang baik agar aktivitas kerja dan pembangunan yang dilakukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai waktu yang telah ditentukan dan berjalan dengan baik. Dan gotong royong merupakan hal yang sangat menunjang pembangunan Desa, karna dalam gotong royong dapat menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat serta pelestarian pembangunan. Hal tersebut dilakukan oleh semua lapisan masyarakat

Desa yang digerakan atau dimonitori langsung oleh Kepala Desa.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna. Faktor yang penghambat tersebut yaitu yang pertama Komunikasi. Seorang Kepala Desa yang mempunyai perananan sentral dalam pemerintahan Desa dituntut mempunyai dan memiliki komunikasi yang baik terhadap masyarakatnya sehingga apapun kegiatan yang diselenggarakan Desa yang menyangkut pembangunan tidak terjadi kesalahpahaman, dan faktor yang selanjutnya yaitu faktor Sumberdaya, dalam prosesnya, pembangunan Desa tidak akan pernah luput dari potensi sumberdaya yang dimiliki Desa baik itu Sumberdaya Kepala Desa, masyarakat Desa, Aparat desa, dan Sumberdaya Alam yang dimiliki Desa. Faktor berikutnya yaitu Sikap yang mana sikap dari seorang pemimpin Desa menjadikan dirinya contoh bagi masyarakat Desa, sikap diatas meliputi ketegasan dan gaya kepemimpinan serta perilaku dari pemimpin.

B. Saran

Sebagai bahan masukan kepada Kepala Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna sehubungan dengan penyusunan skripsi

ini penulis mencoba memberikan saran antara lain :

1. Diharapkan kepada Kepala Desa dapat meningkatkan tugas Kepala Desa dengan secara maksimal lagi. Dimana dalam hal ini tentunya diharapkan adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak atau instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas dalam pembangunan Desa Sebadai Hulu.
2. Kepala Desa harus lebih cermat dan cerdas dalam menentukan prioritas pembangunan dan pemamfaatan waktu dalam pembangunan Desa agar terciptanya pembangunan yang

benar-benar member manfaat bagi masyarakat.

3. Kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintahan Desa yang menjadi contoh bagi masyarakat hendaknya dan dituntut harus memiliki jiwa seorang pemimpin. Dalam hal ini Kepala Desa mestinya bersikap tegas dan bukan otoriter.
4. Kepala Desa dalam memberdayakan Aparat desa perlu dilakukan dalam hal ini yaitu meningkat sertakan kaur-kaur Pemerintahan Desa dalam suatu Pelatihan. Agar mereka ' ' r dan dapat melaksanakan tu a dengan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

A.Surjadi, 1995, *Pembangunan MasyarakatDesa*, MandarMaju, Bandung.

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *MembangunDesaPartisipatif*. GrahaIlmu. Yogyakarta.

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan PedesaandanPerkotaan*.Grah aIlmu. Yogyakarta.

Agus,Dharma, 1995. *Manajemen Supervisi Petunjuk Praktis Bagi Supervisor*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta

As'ad, mohammad.1992. *Psikologi industry*. Yogyakarta. Liberry

Bintoro Tjokroaminoto dan Mustofa Adidjoyo, 2000. *Teori dan Strategi Pembangunan*

Nasional, CV. Haji Mas Agung, Jakarta,

Bintoron, tjokroamidjojo. 1978. *PengantarAdministrasi Pembangunan*. Bandung; PT. Alumni.

Bratakusumah, Deddy Supriadi dan Riyadi. 2005. *PerencanaanPembangunan Daerah (StrategiMenggaliPotensiDal ammewujudkanOtonomi Daerah)*. PenerbitPT .GramediaPustakaUtama .Jakarta.

Daft, Richard.L, 2007. *Manajemen Edisi 6*, PT. Salemba Empat, Jakarta.

Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah OtonomBerkeadilan*. Yogyakarta:

KurniaKalamSemesta,
Uhaindo Media dan Offset.